

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi merupakan indikator dalam proses pembangunan sebuah negara, terlebih bagi negara yang sedang berkembang dimana pembangunan diarahkan untuk mencapai tingkat kemakmuran bagi rakyatnya. Pembangunan nasional pada bidang ekonomi dimaksudkan untuk mewujudkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan merata. Dalam tujuan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, dilakukan dengan memperkuat potensi ekonomi daerah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat diikuti dengan kesejahteraan masyarakat yang lebih bagus. Kesejahteraan ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan (Yasa dan arka, 2015).

Pembangunan ekonomi yang baik harus memiliki struktur yang kuat serta dapat bertahan dalam situasi apapun, serta menempatkan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagai prioritas utama. Pembangunan ekonomi tidak bisa dijauhkan dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada proses penambahan *capacity* produksi perekonomian yang diimplementasikan dalam penambahan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan fungsi-fungsi ekonomi yang mengakibatkan bertambahnya barang dan jasa yang diproduksi masyarakat dan bertambahnya kemakmuran masyarakat (Sukirno,2010).

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberlanjutan pembangunan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi juga diartikan sebagai peningkatan pendapatan nasional atau peningkatan produksi barang dan jasa manufaktur dari periode keperiode. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB). PDB daerah dapat diartikan sebagai seluruh skor tambah yang didapat dari jumlah unit usaha di suatu daerah. Selain PDRB, UMKM juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi (Prasetyo dan Yuliana,2022).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya (Rudjito, 2003). UMKM merupakan salah satu barometer bagi perekonomian nasional yang tahan banting dan tetap optimistis ditengah krisis, hal ini dibuktikan ketika badai krisis moneter melanda Indonesia pada tahun 1997-1998, usaha berskala kecil dan menengah relatif mampu bertahan dibandingkan perusahaan besar. Hal ini dikarenakan mayoritas usaha berskala kecil tidak terlalu tergantung pada modal besar atau pinjaman dari luar dalam mata uang asing. Dengan kondisi dan krisis ekonomi moneter yang tidak stabil pada perekonomian nasional, UMKM tetap bertahan memperlihatkan betapa pentingnya sektor ini (Atin, 2018). Bertahannya UMKM dalam menghadapi krisis dan kondisi perekonomian yang tidak stabil telah menunjukkan betapa pentingnya sektor ini dalam perekonomian nasional (Tulus Tambunan, 2009:72).

Keppres RI no. 99 tahun 1998 tentang pengertian Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. UMKM sebagai benteng pertahanan ekonomi harus diindungi untuk perekonomian nasional (Ali, 2008). Dalam ekonomi nasional, sektor UMKM memiliki kontribusi yang besar, maka dari itu pemerintah melakukan berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan yang dilakukan melalui kolaborasi pemberdayaan UMKM dengan melibatkan pemerintah daerah, pelaku UMKM dan pihak perbankan secara berkesinambungan dan bersinergi.

Menurut pasal 33(4) UUD 1945, UMKM adalah bagian yang mandiri dari perekonomian nasional dan mempunyai potensi besar untuk mendorong kesejahteraan rakyat, dan UMKM memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu pemerintah melakukan kebijakan yaitu dengan pemberdayaan dunia usaha, tingkat pemerintah daerah dan semua masyarakat yang tergolong sehingga saling berkesinambungan dan bersinergi. Pada tabel dibawah ini perkembangan jumlah UMKM di Indonesia.

Tabel 1.1 Data Jumlah UMKM di Indonesia periode 2016-2020

No	JUMLAH UMKM	TAHUN
1.	61,7 Juta	2016
2.	62,9 Juta	2017
3.	64,2 Juta	2018
4.	65,5 Juta	2019
5.	64,2 Juta	2020

Sumber : Kemenkop dan UKM-Litbang KJ/and

Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 64.2 juta atau 99.99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia sehingga basis usaha ini terbukti kuat dalam menghadapi krisis ekonomi dan mempunyai perputaran transaksi yang cepat. Pemerintah menyadari akan potensi UMKM dan mengambil kebijakan yaitu subsidi bunga pinjaman, restrukturisasi kredit, pemberian jaminan modal kerja dan insentif perpajakan.

Perekonomian Indonesia pada tahun 2018 naik 5,17 % lebih meningkat dibandingkan capaian pada tahun 2017 sebesar 5,07% (Sumber : BPS), hal ini membuktikan adanya kontribusi UMKM mendorong pertumbuhan ekonomi dengan diukur dari pendapatan nasional dan pada umumnya Produk Domestik Bruto (PDB) dipakai untuk mengukur pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi indonesia sebesar 5,02% lebih sedikit dari capaian tahun 2018 sebesar 5,17% tetapi pada tahun 2020 hasil dari BPS mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar -2,07%, hal ini mengakibatkan terjadinya deflasi pada perekonomian indonesia atau terdapat penurunan yang drastis yang dipicu oleh ekonomi yang kurang stabil.

Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai daerah yang memiliki UMKM sebanyak 3070 unit dan berkontribusi pada perkembangan UMKM di Sumatera Utara. Namun UMKM di kabupaten ini masih memiliki beberapa hambatan yang perlu dibenahi agar UMKM dapat menjadi produksi ekonomi di Humbang Hasundutan. Pada tabel dibawah ini perkembangan jumlah UMKM di kabupaten Humbang Hasundutan

Tabel 1.2 Perkembangan Jumlah Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017 – 2021

No	Nama Kecamatan	Jumlah Unit				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Doloksanggul	664	654	660	914	959
2.	Baktiraja	89	90	146	185	230
3.	Lintong Nihuta	132	248	352	797	871
4.	Onanganjang	54	92	174	219	258
5.	Parlilitan	55	58	58	93	131
6.	Pakkat	31	27	38	76	104
7.	Pollung	157	146	166	168	212
8.	Sijamapolang	42	39	56	63	98
9.	Paranginan	52	49	40	59	121
10.	Tarabintang	17	25	39	69	86
Total		1293	1428	1729	2643	3070

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Humbang Hasundutan

Berdasarkan data Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Humbang Hasundutan dari tahun 2017-2021 dapat diperhatikan dimana jumlah UMKM didalam lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Banyaknya UMKM yang tersebar menunjukkan bahwa kegiatan sangat baik dalam membantu perekonomian. Terdapat banyak UMKM yang tersebar di kecamatan yang berada di kabupaten Humbang Hasundutan, salah satunya adalah kecamatan Lintongnihuta yang terdaftar pada dinas Koperasi dan UKM terdapat 871 unit. Hal ini menggambarkan dimana jumlah UMKM terus mengalami peningkatan.

Berdasarkan penelitian Bin Hasri, et al (2013), mengungkapkan bahwa UMKM memiliki peran sebagai penopang dalam perekonomian daerah yang menjadi salah satu penentuan pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan perkembangan UMKM yang terus menunjukkan peningkatan, serta kontribusinya yang cukup besar terhadap penciptaan kesempatan kerja dan sumber pendapatan khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah, tidak dapat diingkari bagaimana pentingnya keberadaan UMKM, besarnya peranan usaha mikro kecil dan menengah dalam perekonomian nasional dan daerah, sudah sewajarnya UMKM mendapatkan perhatian yang besar. Namun dibalik besarnya populasi dan potensinya, UMKM di Indonesia memiliki masalah yang cukup beragam, yang salah satunya yaitu terkait permodalan.

Menurut penelitian Angraini (2013) semakin banyak permodalan KUR di daerah Sumatra Utara, khususnya Medan, sehingga makin besar pula level pendapatannya yang didapatkan oleh pelaku UMKM, demikian pula sebaliknya. Tetapi untuk keadaan lainnya, dalam kajian Mahmudah (2015) menerangkan dimana makin bagus permodalan pinjaman KURnya yang didapatkan bagi UMKM pada daerah Laren Kab. Lamongan, sehingga pendapatan UMKM pun meningkat. Dan hasilnya dari kajian Putra dan Saskara (2013) menunjukkan bahwa penambahan modal KURnya memberikan dampak yang positif serta cukup efektif untuk penambahan modal serta penyerapan tenaga kerja.

Dalam kenyataan yang terjadi pada masyarakat menengah kebawah tidak keseluruhan memiliki modal usaha yang memadai guna untuk memulai atau meningkatkan perkembangan usahanya tersebut serta produktivitasnya, sehingga

masyarakat menengah kebawah ini memerlukan bantuan modal yang berupa pinjaman atau kredit, salah satunya disuatu lembaga perbankan (Artis, 2012). Tanpa adanya modal yang cukup, tentu akan menghambat proses pengadaan barang dan jasa. Menurut Prawoto (2016:123), menyatakan terkait kendala kurangnya permodalan, dalam hal ini pelaku usaha membutuhkan pinjaman dari perbankan dengan jumlah kredit yang mampu mencukupi kebutuhan dalam mengembangkan usahanya.

Menurut Atin (2018), kendala UMKM yaitu banyak perbankan yang menetapkan beban kredit (bunga) yang tergolong tinggi sehingga banyak UMKM yang enggan untuk meminjam, sehingga dalam masalah ini pemberian kredit dengan bunga dan angsuran yang ringan dirasa sangat penting mengingat kebutuhan pembiayaan modal kerja dan investasi diperlukan untuk menjalankan usaha dan mengembangkan skala usahanya. Menurut penelitian yang dilakukan Ade (2011) tentang pengaruh jumlah kredit terhadap produktivitas UKM di Kota Denpasar menunjukkan bahwa salah satu variabel yang mempengaruhi efektivitas penggunaan kredit adalah jumlah kredit yang diberikan kepada UMKM.

Selanjutnya para pelaku UMKM tersebut kesulitan untuk memenuhi persyaratan yang ditawarkan oleh pihak bank, biasanya prosedur yang harus dilalui cukup lama serta persyaratan serta jaminan masih sulit dipenuhi oleh pelaku usaha mikro, oleh karena itu dalam pengajuan kredit dibutuhkan prosedur yang tidak berbelit-belit dan mudah untuk dipenuhi, agar para pelaku usaha tidak kesulitan dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan terkait agunan dan persyaratan maupun yang lainnnya.

Menurut Anggiawan (2010) realisasi pembiayaan harus bersifat efektif yaitu mudah dalam prosedurnya dan tidak membutuhkan waktu yang lama dalam pencairannya. Sehingga di perlukan faktor utama yang dapat mendukung cepat dan mudah dalam perealisasiannya. Prosedur pelaksanaan penyaluran KUR bagi beberapa UMKM atau masyarakat tidak mudah. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi karena sebagian besar debitur dalam penggunaan modal usahanya sering menyimpang dari alasan pada saat mengajukan kredit atau KUR. Berdasarkan penelitian Jeriko (2014), kasus lain yang menjadi sorotan adalah adanya sebagian pelaku usaha yang meminjam bantuan KUR tersebut, tetapi tidak menggunakan bantuan tersebut sebagai modal usaha , tetapi untuk hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan usaha yang dijalani, sehingga membuat pelaku usaha tersebut sulit dalam melakukan pembayaran kewajiban kepada bank pelaksana peminjam modal tersebut.

Dengan melihat permasalahan yang dihadapi oleh sektor UMKM, serta mengingat bagaimana pentingnya UMKM terhadap perekonomian nasional, dibutuhkan peran pemerintah untuk mengadakan kebijakan ekonomi terkait pemberdayaan UMKM terutama berupa bantuan kredit usaha dengan beban kredit yang ringan dan prosedur yang mudah. Dalam rangka percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM, pemerintah menerbitkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai langkah konkrit percepatan aksesibilitas permodalan usaha kepada pelaku UMKM di Indonesia.

Kredit usaha rakyat (KUR) dikeluarkan berdasarkan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan

pemberdayaan sektor mikro, kecil dan menengah khususnya bidang reformasi sektor keuangan. KUR adalah skema kredit atau pembiayaan modal kerja atau investasi yang khusus diperuntukkan bagi UMKM di bidang usaha produktif yang usahanya layak namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan perbankan (belum bankable). Melalui program kredit usaha rakyat ini pemerintah berharap dapat mempercepat perkembangan kegiatan perekonomian dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. KUR ini merupakan program pemberian pinjaman berupa uang tunai kepada peminjam dengan tujuan untuk menjadi modal bagi sipeminjam untuk membuka usaha baru. Kredit ini ditujukan untuk membantu ekonomi usaha rakyat kecil dengan cara memberi pinjaman untuk usaha yang didirikannya. Pada gambar dibawah ini disajikan realisasi penyaluran KUR di Indonesia tahun 2015-2021.

Gambar 1.1

Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (2015-2021)



Sumber : Data Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM

Berdasarkan data Komite kebijakan pembiayaan bagi umkm dari tahun 2015-2021 dapat diperhatikan dimana penyaluran KUR selalu mengalami

kenaikan, tetapi ada beberapa tahun yang target penyaluran KURnya lebih tinggi daripada KUR yang telah di realisasikan kepada beberapa UMKM. Realisasi penyaluran KUR konsisten meningkat tiap tahun selama periode 2015-2021. Menurut data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pada tahun 2015 realisasi penyaluran KUR baru berjumlah Rp22,75 triliun. Kemudian di tahun-tahun berikutnya nilainya terus bertambah seperti terlihat pada grafik, hingga mencapai Rp 281,86 triliun pada 2021. Sepanjang 2021, realisasi penyaluran KUR dilaporkan paling banyak masuk ke segmen KUR Mikro 63,71%, diikuti KUR Kecil 32,71%, KUR Super Mikro 3,57%, dan KUR Tenaga Kerja Indonesia 0,01% (Pradita,2022).

Berjalannya setiap kegiatan usaha tidak terlepas dari diperlukannya modal dan lebih tepatnya bantuan modal. Hal ini masih merupakan tanggung jawab pemerintah daerah sehingga KUR menjadi program yang paling laris bagi pelaku usaha tersebut. Penerimaan dana KUR tersebut didapat dari bank sebagai penyalur dana sesuai dengan proses dan tahapannya. Salah satu bank nasional yang melayani pemberian KUR adalah BRI Unit Lintongnihuta sebagai tempat penelitian dan menjadi tolak ukur untuk meneliti keefektifan program KUR terhadap pelaku UMKM di kecamatan Lintongnihuta.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) memiliki komitmen untuk membantu dan konsisten melayani dalam mengembangkan UMKM serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk komitmen itu adalah dengan dibukanya kredit untuk modal usaha bagi UMKM yang disebut dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR ini merupakan alternatif bagi para pelaku UMKM

untuk mendapatkan modal usaha. Pada tahun 2022 Bank Rakyat Indonesia Unit Lintongnihuta telah merealisasikan penyaluran program KUR. Pada tabel di bawah ini disajikan Jumlah nasabah yang meminjam KUR selama bulan Januari sampai bulan Desember tahun 2022.

**Tabel 1.3 Jumlah nasabah yang meminjam Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Bulan Januari – Desember 2022**

No	Bulan	Jumlah Nasabah
1.	Januari	35
2.	Februari	40
3.	Maret	39
4.	April	35
5.	Mei	47
6.	Juni	34
7.	Juli	41
8.	Agustus	33
9.	September	38
10.	Oktober	41
11.	November	43
12.	Desember	40
Total		466

Sumber : BRI Unit Lintongnihuta 2023

Berdasarkan Tabel 1.3 tingkat perkembangan KUR pada Tahun 2022 di BRI Unit Lintongnihuta di Kecamatan Lintongnihuta terus mengalami kenaikan setiap bulannya serta kenaikan yang terjadi pada bulan Januari hingga bulan Desember 2022 mengalami peningkatan, hal ini terjadi karena penyaluran dana KUR berfokus

pada kelompok mikro seperti UMKM. Ini berarti menunjukkan perkembangan penyaluran KUR cukup berkembang dan diminati para UMKM di Kecamatan Lintongnihuta. Tingginya pengaruh UMKM dalam perekonomian nasional dan daerah khususnya di Kecamatan Lintongnihuta, seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih terhadap keberadaan UMKM guna untuk penguatan ekonomi kerakyatan di kabupaten Humbang Hasundutan. Dengan demikian diharapkan agar pemberian KUR dapat meningkatkan pendapatan pelaku usaha atau UMKM.

BRI Unit Lintongnihuta merupakan bank yang dalam penyaluran pinjamannya cukup meningkat setiap bulan untuk pencapaian targetnya. Adanya beberapa aspek kelayakan usaha yang menjadi syarat untuk mendapatkan KUR yang bertujuan agar dana yang di terima tidak menjadi kredit macet karena keterlambatan pembayaran atau pelunasan pinjaman. Selain itu penyaluran kredit dikatakan produktif jika kredit yang disalurkan kepada UMKM yang diberikan benar-benar digunakan untuk pembiayaan sebagaimana yang dicantumkan dalam proposal kreditnya. Pemberian kredit mempunyai tingkat resiko kredit yang tinggi bagi bank karena memiliki biaya dana yang cukup tinggi pula untuk membiayainya (Tracey,2011). Keterlambatan pengembalian kredit akan merugikan pihak bank, modal menjadi beku dan menurun serta berkurangnya pendapatan yang mestinya diperoleh dari hasil pemberian kredit.

Efektivitas ialah suatu sasaran atau tujuan yang telah dicapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Menurut Yhushinta (2006) efektivitas adalah suatu program yang dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu program untuk mewujudkan hasil yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan, begitu juga dengan efektivitas KUR, efektivitas program KUR bisa dilihat dari besarnya alokasi penyaluran kredit dan sangat tergantung pada distribusi pengalokasiannya, baik menurut sektor ekonomi maupun penerimanya (pelaku ekonominya).

Menurut Anugrah (2013) Indikator efektivitas dalam penyaluran kredit meliputi berhasil atau tidaknya seseorang atau suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan dalam penyaluran kredit, adanya perkembangan dan pertumbuhan yang dialami seseorang ketika adanya penyaluran kredit, dan adanya perbedaan positif secara signifikan antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi (sebelum atau sesudah) dalam penyaluran kredit. KUR yang disalurkan BRI Unit Lintongnihuta diharapkan akan mampu mengatasi masalah UMKM di Kecamatan Lintongnihuta.

Berdasarkan fenomena dan tinjauan teoritis dan empiris seperti latar belakang maka penelitian ini dilakukan untuk mengukur efektivitas penyaluran KUR BRI terhadap peningkatan profit UMKM di Kecamatan Lintongnihuta. Untuk mengukur dan mengetahui efektivitas penyaluran KUR dalam penelitian ini menggunakan indikator yang terdiri dari ketepatan penggunaan dana, ketepatan jumlah kredit, ketepatan beban kredit dan ketepatan prosedur.

Pada penelitian diharapkan dapat berjalan secara efektif karena hal tersebut akan sangat berdampak positif bagi usaha-usaha kecil yang masih membutuhkan modal untuk perkembangan usaha mereka. Oleh karena itu perlu dilakukannya penelitian untuk mengetahui bagaimana pelaksana KUR, tujuannya untuk

mengetahui apakah program tersebut berjalan efektif sesuai dengan rencana yang telah ditentukan pemerintah yaitu membantu masyarakat dalam mengembangkan UMKM melalui bantuan yang diberikan pemerintah melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI), dimana efektivitas KUR ini diukur dengan ketepatan penggunaan dana, jumlah kredit, beban kredit, dan prosedur. Penilaian ini penting diketahui agar diperoleh data dan informasi terkini guna pengembangan program yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Berdasarkan latar belakang seperti yang dikemukakan sebelumnya yang juga mengindikasikan adanya permasalahan yang dapat mengakibatkan program menjadi tidak efektif dan beberapa perbedaan penelitian yang dikemukakan diatas penulis ingin melakukan penelitian kembali mengenai program tersebut efektif atau tidaknya, maka perlu diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan program KUR terhadap UMKM yang mengakses program tersebut. Penilaian ini akan didapatkan secara langsung berdasarkan persepsi nasabah KUR, hal ini penting diketahui supaya diperoleh data dan informasi terkini guna mengembangkan program yang lebih baik dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Pengaruh Efektivitas Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Peningkatan Profit Usaha Menengah Kecil Mikro” (Studi Kasus Pada Nasabah Bank Rakyat Indonesia Unit Lintongnihuta)**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Kendala UMKM terkait permodalan, dalam hal ini pelaku usaha membutuhkan pinjaman dari perbankan dengan jumlah kredit yang mampu mencukupi kebutuhan dalam mengembangkan usahanya.
2. Masih banyak perbankan yang menetapkan beban kredit (bunga) yang tergolong tinggi sehingga banyak UMKM yang enggan untuk mengajukan pinjaman kredit.
3. Para pelaku UMKM kesulitan untuk memenuhi persyaratan yang ditawarkan oleh pihak bank, biasanya prosedur yang harus dilalui cukup lama serta persyaratan dan jaminan masih sulit dipenuhi oleh pelaku UMKM.
4. Penggunaan dana pinjaman yang kurang tepat oleh pelaku usaha, yaitu masih sering dimanfaatkan atau dialih fungsikan selain keperluan usaha. Penggunaan dana pinjaman yang kurang tepat oleh pelaku usaha, yaitu masih sering dimanfaatkan atau dialih fungsikan selain keperluan usaha.

1.3 Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan serta terbatasnya kemampuan untuk meneliti semua masalah yang ada, maka dilakukan pembatasan masalah. Maka penelitian ini menitikberatkan pada “Analisis Pengaruh efektivitas Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap peningkatan profit UMKM, dimana

efektivitas KUR diukur dengan ketepatan penggunaan dana, jumlah kredit, beban kredit, dan prosedur berdasarkan penilaian yang diberikan nasabah KUR. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel penelitian yaitu nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Lintongnihuta.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh efektivitas ketepatan penggunaan dana terhadap peningkatan profit UMKM pada nasabah KUR BRI Unit Lintongnihuta?
2. Bagaimana pengaruh efektivitas ketepatan jumlah kredit terhadap peningkatan profit UMKM pada nasabah KUR BRI Unit Lintongnihuta?
3. Bagaimana pengaruh efektivitas ketepatan beban kredit terhadap peningkatan profit UMKM pada nasabah KUR BRI Unit Lintongnihuta?
4. Bagaimana pengaruh efektivitas ketepatan prosedur terhadap peningkatan profit UMKM pada nasabah KUR BRI Unit Lintongnihuta?
5. Bagaimana pengaruh efektivitas ketepatan penggunaan dana, jumlah kredit, beban kredit dan prosedur secara simultan terhadap peningkatan profit UMKM pada nasabah KUR BRI Unit Lintongnihuta BRI Unit Lintongnihuta?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas ketepatan penggunaan dana terhadap peningkatan profit UMKM pada nasabah KUR BRI Unit Lintongnihuta.
2. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas ketepatan jumlah kredit terhadap peningkatan profit UMKM pada nasabah KUR BRI Unit Lintongnihuta.
3. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas ketepatan beban kredit terhadap peningkatan profit UMKM pada nasabah KUR BRI Unit Lintongnihuta.
4. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas ketepatan prosedur terhadap peningkatan profit UMKM pada nasabah KUR BRI Unit Lintongnihuta.
5. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas ketepatan penggunaan dana, jumlah kredit, beban kredit dan prosedur secara simultan terhadap peningkatan profit UMKM pada nasabah KUR BRI Unit Lintongnihuta.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan terkait pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan manfaatnya terhadap pelaku UMKM serta mampu menjadi referensi bagi

penelitian sejenis sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai sarana menggali pengetahuan, pengalaman, dan wawasan yang diharapkan berguna baik dimasa sekarang maupun di masa yang akan datang.

b. Bagi Mahasiswa

Sebagai bahan referensi pengetahuan tentang pengaruh efektivitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap peningkatan profit UMKM.

c. Bagi Pemerintah/Lembaga Terkait

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), agar nantinya program tersebut dapat berjalan lebih baik dari pelaksanaan sebelumnya.